

Media Komunitas Universitas Gadjah Mada

Bulaksumur Pos

Edisi 205 | Selasa, 16 Oktober 2012



Lika-Liku Juru Parkir

//FOKUS
**Kala Keamanan
Jadi Alasan**

//PARAMETER
**Pemanfaatan
Kantong Parkir UGM**

//BICARA DJOGJA
**Yogyakarta
Selalu Istimewa**

//Unduh di sini!
bulaksumurugm.com



<http://goo.gl/XsqBb>

Keberlanjutan Organisasi

Bulan Oktober merupakan bulan transisi bagi SKM UGM Bulaksumur. Ada beberapa momen penting bagi kami maupun *civitas* akademika di bulan Oktober ini. Momen pertama adalah Gelanggang Expo, ajang perekrutan anggota baru yang dilakukan secara bersamaan oleh seluruh UKM. Selain para pendaftar, pada momen ini pula kami mendapatkan ganjaran atas hasil kerja keras berupa Juara I Lomba Website UKM dan Juara II Lomba Company Profile yang diadakan pihak panitia Gelanggang Expo. Pada pertengahan Oktober, kami melakukan serangkaian tes bagi para calon awak baru SKM UGM Bulaksumur. Serangkaian tes tersebut kami lakukan untuk mengetahui seberapa besar minat mereka dalam berkecimpung di dunia jurnalistik.

Kedua momen di atas mengisyaratkan adanya sebuah proses transisi dan regenerasi dalam organisasi. Kami sebagai pengurus tahun 2011-2012 sebentar lagi akan berpamitan kepada para pembaca sekalian. Edisi 205 ini akan menjadi edisi pamungkas kepengurusan kami sebelum melakukan regenerasi sebagai konsekuensi keberlanjutan organisasi. Meski begitu, edisi ini tentu bukan edisi Bulaksumur Pos terakhir. Manusia datang, tumbuh, dan berganti, tetapi roda organisasi akan terus berputar. Transisi adalah hal yang wajar bagi sebuah organisasi. Ibarat sebuah mesin, kami harus menambah komponen-komponen baru dalam keberlangsungan organisasi.

Terakhir, tidak lupa kami ucapkan selamat menjalani ujian tengah semester bagi segenap pembaca sekalian. Selepas UTS, Bulaksumur Pos akan kembali menyapa pembaca, dengan tampilan yang tentunya lebih segar karena dikerjakan oleh pengurus baru. Selamat menikmati karya pamungkas kepengurusan kami. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat bagi para pembaca sekalian dalam mengarungi Oktober ini. Selamat menempuh UTS dan sampai berjumpa kembali!

Penjaga Kandang



Foto: Hasna/Bul

TAJUK

Pilih Digembosi atau Hilang?

Label sebagai universitas ternama ternyata tidak menjamin UGM terhindar dari berbagai permasalahan yang terkesan sepele, seperti memenuhi tingginya permintaan lahan parkir. Memasuki tahun ajaran baru, kawasan kampus semakin padat dan kantong-kantong parkir di sekitar kampus laris diserbu mahasiswa. Meski UGM sudah menyediakan beberapa kantong parkir baru, ternyata area parkir di tiap fakultas terus saja menggemuk. Menggemuk oleh kendaraan dan celoteh terkait pelanggaran parkir.

Kisah penggembosan ban motor yang parkir melebihi jam malam oleh penjaga parkir ataupun SKKK UGM mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Beberapa di antara kita bahkan mungkin pernah menjadi korban. Penggembosan ban motor tersebut merupakan sebuah inovasi dalam penegakan kebijakan parkir UGM agar kendaraan tersebut tidak dicuri. Masing-masing fakultas diberi keleluasaan untuk bebas bertindak dalam penegakan peraturan parkir. Mahasiswa yang masih parkir melebihi jam malam harus siap menanggung konsekuensinya.

Namun, beberapa pihak yang menyangkan aksi penggembosan tersebut. Banyak pihak merasa dirugikan karena sebelumnya tidak ada sosialisasi mengenai kebijakan tersebut. Peraturan diciptakan memang untuk ditaati, tetapi bagaimana bisa menaati peraturan apabila kita bahkan tidak tahu peraturannya? Akan lebih baik apabila di setiap lahan parkir UGM dipasang papan peraturan yang berbunyi, "Parkir diatas jam sepuluh malam, pilih digembosi atau hilang?" Setidaknya, jika ada sosialisasi peraturan, kedua belah pihak akan sama-sama tahu diri dalam bersikap. Jika mahasiswa melanggar jam parkir, mau tidak mau para juru parkir akan segera beraksi dengan sanksi-sanksi inovatif bagi para pelanggar jam parkir yang budiman.

Tim Redaksi



Penerbit: SKM Bulaksumur. Pelindung: Prof Dr Pratikno M Sos Sc, Dr Drs Senawi MP. Pembina: Dr Phil Ana Nadhya Abrar MES. Pemimpin Umum: Ahmad Waskhita. Sekretaris Umum: Arrina Mayang. Pemimpin Redaksi: Salsabila Sakinah. Sekretaris Redaksi: Mistika E A. Editor: Febriani. Redaktur Pelaksana: Annisa IT, Amanatya J, Aghnia RSA, Dwi AP, M Izuddin, Adinda RK, Dewi AN, Emma AM, Franciscus ASM, Indah P, Kalikautsar, Khairunnisa, Laila N, Pipit N, Pipit S, Putri EJ, Resti P, Reza RU, Sekar L, Tri P, Vinalia EW, Winny WM, Yusuf AW. Reporter: Ahmad RH, Ahmad TSA, Amanda D, Ario BU, Arum K, Edwina PP, Fauziah O, Gloria EB, Hamada AM, Hasna FB, Nirmala F, Reny KA, Theresia NTNP, Wanda A, Winalia L, Zainurrahmah, Ziyadatur. Manajer Iklan dan Promosi: Gina Dwi Prameswari. Sekretaris Iklan dan Promosi: Hanum SN. Staf Iklan dan Promosi: Berta MS, Fasa Y, Febriyanti R, Indi F, Mumpuni GL, Surya AR, Yuli NS, Agung A, Daimas NPK, Dhyta WEP, Faiz IP, Gaiety SA, Hardita LS, Irsa NP, Oki P, Rizky Y, Yong MA, Andreas K, Dinda RR, Dwitamtyo JW, Esti E, Fabsya F, Indriani, Mega P, Rahma H, Rendy HS, Ruth L. Kepala Litbang: Satria Aji Imawan. Sekretaris Litbang: Rahmi SF. Staf Litbang: Erik BS, Rizkiya AM, Isnaini R, Robertus S, Shabrina HP, Tyas NA, Wandi DS, Adib AF, Afrianda S, Alvin RP, Dyan WU, Ikrar GR, Irene T, Lisnawati S, Luthfi NA, Mukhanif YY, M Afif, Restu R. Kepala Produksi: Dian Kurniasari. Sekretaris Produksi: Zakiah I. Korusubdiv Fotografer: Imam S. Anggota: Anditya EF, Hale AW, Oholib GHS, Ahmad FR, Novandar DPA, Adityo RD, Hasna FK, Keumala H, Lin IR, Nastiti U, Rizky PPKK, Talita U. Korusubdiv Lay-Outer: Nisa TL. Anggota: Pandu WMS, Yoana WK, Damar PW, Ferdi A, M Rohmani, Huda K, Maharany F, Wedar P. Korusubdiv Ilustrator: Fikri RK. Anggota: Bayu A, Ardista K, Irma S, Iwandhana W, Malika M, Destrianita D, Farhan I, Prycilia W, Ryan RK, Revta F, Sukmasari A. Korusubdiv Webdesign: Chilmi N. Anggota: Danastri RN, Geni S. Magang: Yulika, Ahmad BA, Eka N, Firstian BA, Hesty F, Hidayatul A, Indriani, Jyestha TB, Sri Yanti N, Tamalia U.

Alamat Redaksi, Iklan dan Promosi: Bulaksumur B-21 Yogyakarta 55281. Telp: 085729700523. E-mail: bulaksumur_mail@yahoo.com. Homepage: <http://www.bulaksumurugm.com>. Rekening Bank: Bank Danamon Cabang Diponegoro Yogyakarta 003533457408 a.n. Gina Dwi Prameswari.

Lika-Liku Juru Parkir

Tiap Minggu pagi, kepadatan kendaraan di area sekitar UGM selalu melebihi hari biasa. Ratusan sepeda motor berjajar memenuhi badan jalan sepanjang Lembah UGM hingga area Program Diploma Ekonomi dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (PDEB-SV UGM). Kemacetan pun tak pelak terjadi. Penyebabnya adalah Sunday Morning (Sunmor), pasar tumpah yang digelar di sepanjang kawasan tersebut mulai jam 6 pagi hingga tengah hari.

Di tengah kesemrawutan arus lalu lintas tersebut, kehadiran juru parkir tentu merupakan solusi. Petugas parkir dengan sigap membantu pengunjung menata kendaraan pengunjung Sunmor. Namun, tetap saja keberadaan area parkir tersebut menutupi akses lalu lintas. Pasalnya, sejak empat tahun belakangan, kegiatan Sunmor dipusatkan di sekitar Lembah UGM. "Pertama dulu kan di Grha Sabha, sekarang pindah ke sini, ya jelas jadi *rame*. Kalau dulu di sini sepi, *kan* mahasiswa belum tahu aturannya," ujar Dodi (23), Ketua Paguyuban Tukang Parkir Sunmor wilayah sekitar Bundaran Filsafat.

Meski berlokasi di sekitar area kampus, pengendara yang hendak parkir di Sunmor tetap dipungut biaya. Hal tersebut mengesankan seolah kegiatan Sunmor membuka peluang bagi jasa parkir serabutan atau ilegal. Namun pada kenyataannya, petugas parkir yang berada di sana justru telah mendapat izin resmi dari pihak UGM. "Jadi, kita memang di sini sudah ada izin resmi. Ini *kan* seragam yang kita pakai juga dari UGM," kata Dodi sambil menunjukkan seragamnya. Meski demikian, masih ada beberapa orang yang memungut uang parkir meski tidak berseragam. Menanggapi hal tersebut, Dodi mengungkapkan bahwa mereka yang tidak berseragam biasanya adalah anggota baru. "Nah kalau itu, mereka hitungannya anak baru, jadi mereka itu belum *dapet* seragam," ujarnya.

Dari segi penghasilan, semua petugas parkir wilayah Sunmor mendapatkan gaji per bulan dari UGM. Namun, hasil yang mereka dapatkan bisa jadi tidak sama tiap bulannya. Besarnya gaji per bulan yang didapatkan setiap petugas parkir sangat bergantung pada jumlah uang yang disetorkan kepada UGM. "Biasanya sekali *markir dapet* sekitar 30.000, terus dikumpulin untuk itu (setoran ke UGM, -Red)," ujar Dodi. Untuk menentukan besar penghasilan tiap bulan, hasil mereka bertugas sehari-hari dikumpulkan tiap minggu dan disetorkan ke UGM melalui rekening rektor. Selain itu, setiap minggunya mereka juga harus membayar uang keamanan dan kebersihan kepada UGM sebagai bentuk kontribusi.

Secara organisasi, para petugas parkir di area Sunmor memiliki struktur yang rapi. Meski satu seragam, mereka dibagi menjadi beberapa paguyuban sesuai wilayah parkir. "Kan tiap paguyuban ada ketuanya sendiri. Nah nanti ketuanya tiap bulan ada rapat sama UGM," jelas Dodi.

Di tengah kesibukan, mereka seringkali dipusingkan dengan pengunjung yang sengaja memarkir kendaraan di luar area parkir. "Ya *kan* kita sudah *ningetin* untuk *nggak* parkir di luar area kita, tapi mereka tetap milih parkirin sendiri. *Nggak*



Foto: Rizky Cabuca/Bul

tahu *kan* nanti resikonya apa. *Kan* kalau seandainya hilang, mesti kita yang ditanya," keluh Dodi. Ia mengungkapkan bahwa di area selain area parkir resmi memang sering terjadi kehilangan. Oleh karena itu, ia menyarankan kepada para pengunjung Sunmor untuk memanfaatkan area parkir yang telah disediakan.

Menanggapi keluhan pengunjung tentang penarikan uang parkir, Dodi berharap UGM melakukan sosialisasi yang lebih kepada masyarakat tentang perbedaan area parkir Sunmor dengan portal masuk area UGM. "Kan pikirannya orang-orang, *kok* masuk UGM *aja* bayar, *pas* parkir *kok* bayar lagi," ujarnya. Dengan sosialisasi, harapannya tidak akan terjadi kesalahpahaman dari pengunjung. "Paling *nggak* untuk wacana *lah* buat UGM," pungkasnya.

Aji, Rizky

Baca kisah lain mengenai lika-liku juru parkir di www.bulaksumurugm.com

Wajib Berpakaian Rapi di EB Cafe

Sejak beberapa bulan yang lalu, Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) diramaikan dengan pembukaan EB Cafe yang berlokasi di lantai delapan Pertamina Tower. Kafe milik FEB yang beberapa perlengkapannya merupakan sumbangan dari Djarum Foundation ini didesain dengan nuansa *coffee shop*. Menu yang disediakan sebagian besar adalah kopi dengan berbagai variasi.

Hal yang menarik, kafe ini terbuka bagi lahan praktik langsung mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja. Salah satu *part timer* mahasiswa, Fadli Ariesta (Manajemen '10) menuturkan, "Untuk karyawannya adalah mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis sendiri, dari sini ingin mendayagunakan mahasiswanya sendiri." Para mahasiswa yang bekerja di sini bisa menyesuaikan jadwal *shift* kerja dengan jadwal kuliah masing-masing.

Namun demikian, untuk mengunjungi kafe ini ternyata tetap harus mematuhi aturan fakultas yang telah ditetapkan. "Untuk sementara *sih* iya, karena kita masuk wilayah Fakultas Ekonomika dan Bisnis, kita terikat aturan, jadi *kayak* minimal pakai *polo shirt* dan *nggak* boleh pakai sandal biasa, pakai sepatu, terus ini *kan no smoking area*," ungkap Fadli. Hal senada diungkapkan Aulia (Pascasarjana Psikologi '11), salah satu pengunjung EB Cafe. "Iya memang di sini harus terikat



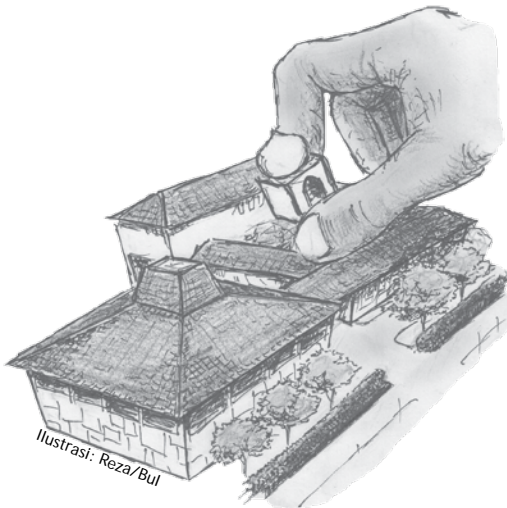
Foto: Rizky Karo/Bul

aturan, tapi saya pikir *nggak* apa-apa *sih*, *kan* yang datang juga mahasiswa yang lagi kuliah, mereka juga pasti bersepatu dan memakai pakaian yang rapi *lah*."

Mengingat ke depannya kafe ini akan dibuka untuk umum, sampai saat ini pihak pengelola masih membahas mengenai aturan yang akan diberlakukan. "Tapi untuk sementara *sih* harus mematuhi aturan yang diberlakukan oleh Fakultas Ekonomika dan Bisnis saat memasuki wilayah ini, *kan* terikat sama fakultas," pungkas Fadli.

Zia

Gelanggang Akan Mempunyai Mushola



Sebuah mushola akan dibangun di Gelanggang Mahasiswa UGM. Ana, Staf Administrasi Manajemen Gelanggang membenarkan hal tersebut dengan menunjukkan proposal pengajuan pembangunan mushola Gelanggang. Ia menjelaskan bahwa tender pembangunan mushola ini telah dimenangkan oleh salah satu pihak swasta. Sayangnya, pembangunan yang rencananya akan dilaksanakan bersamaan dengan Gelanggang

Expo ini belum dapat dijalankan karena belum ada surat perintah kerja dari universitas.

Latar belakang rencana pembangunan mushola ini adalah keresahan beberapa pihak atas ketiadaan tempat ibadah di Gelanggang. "Pengurus Gelanggang sulit melaksanakan salat Dzuhur dan Ashar yang masih masuk pada jam kerja. Penganut agama Islam di Gelanggang juga cukup besar, sehingga kehadiran mushola di Gelanggang diharapkan dapat mempermudah dalam beribadah dan mushola bisa dijadikan sebagai tempat kajian keislaman," ungkap Basuki SIP, Kasubdit Pengembangan Kemahasiswaan UGM. Namun, tidak semua pihak menyetujui rencana pembangunan ini. Ada beberapa nada kontra, salah satunya diutarakan oleh Hafidz (PSdK'09). "Pembangunan mushola hanya akan membuat tata ruang gelanggang semakin tidak jelas," sesalnya. Menurut, masih tersedia beberapa mushola di sekitar gelanggang yang layak digunakan, sehingga kebutuhan akan mushola tidak terlalu mendesak. "Kecuali pembangunan mushola ini dibarengi dengan pembangunan gelanggang," tambah Hafidz.

Walau bagaimanapun juga, pembangunan mushola akan tetap dilaksanakan. "Lagipula mushola ini hanya bersifat sementara dan modelnya tidak permanen, sehingga bisa dipindah sewaktu-waktu. Pembangunan gelanggang juga diharapkan dapat dilakukan segera, mengingat ketidaklayakan gelanggang sebagai tempat unit kegiatan mahasiswa," tegas Basuki.

Basuki menuturkan bahwa pembangunan mushola ini diperkirakan akan menelan biaya sebesar 100 juta yang bersumber dari uang mahasiswa yang dikelola universitas. Pembangunan mushola ini diperkirakan akan memakan waktu sekitar dua bulan. Perwakilan mahasiswa dari beberapa UKM turut berkumpul bersama pihak gelanggang dalam acara sosialisasi pembangunan mushola pada Jumat (14/9) lalu.

Yulika

Kekerasan dan Subjektivitas

Tawuran pelajar kembali menjadi isu hangat di media saat ini. Berbagai elemen masyarakat tak kalah heboh turut berkomentar, terlebih lagi pemerintah. Bahkan, Menteri Agama Suryadharma Ali sempat mengusulkan agar jam pelajaran agama di sekolah ditambah sebagai upaya mencegah tawuran.

Belum lama ini, saya sempat berbincang dengan beberapa teman membahas isu tawuran tersebut. Di tengah pembicaraan, tiba-tiba saja salah satu dari mereka berkomentar, “*Yaelah, jauh-jauh amat ngomongin anak SMA pada tawuran. Mahasiswa di sini juga ada tuh beberapa yang bentrok dari fakultas berbeda. Antarjurusan juga ada loh.*”

Ya, barangkali kita sudah lama mendengar isu bahwa di kampus ini beberapa kelompok mahasiswa yang konon mengatasnamakan fakultas masing-masing sempat saling bentrok. Isu teranyar yang saya dengar adalah konflik antarjurusan di fakultas yang sama. Meski sejauh ini tidak terjadi kerusuhan yang ekstrem, tetapi suasana tegang itu ternyata dirasakan oleh sebagian mahasiswa. Di permukaan mungkin hal ini tidak begitu tampak dan terkesan baik-baik saja. Namun jika hal ini dibiarkan, tidak menutup kemungkinan suatu saat akan menjadi sebuah konflik terbuka yang bisa merugikan banyak orang.

Konflik antara dua pihak atau lebih tak jarang diikuti unsur kekerasan. Kita perlu tahu bahwa praktik kekerasan tak selamanya berada di ranah fisik. Kekerasan nonfisik ternyata masih banyak kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Tindakan diskriminatif bisa menjadi salah satu contoh bahwa kekerasan nonfisik sedang berlangsung.

Suatu kali seorang teman pernah menulis sebuah kutipan di akun Facebooknya. Menurut saya, kawan ini mengutip bagian yang cukup menarik. Kira-kira begini bunyi terjemahannya:

“Ketika kamu menyebut dirimu sebagai orang India atau orang Muslim atau orang Kristen atau orang Eropa, atau sebutan lainnya, maka sesungguhnya kamu telah melakukan tindak kekerasan. Apakah kamu tahu mengapa itu disebut tindak kekerasan? Karena kamu telah memisahkan diri dari orang lain. Ketika kamu membatasi dirimu sendiri dengan kepercayaan, kewarganegaraan, tradisi, tindakan tersebut melahirkan kekerasan. Jadi, agar seseorang tidak melakukan tindak kekerasan, ia tidak menggolongkan diri pada negara manapun, agama apapun, partai politik atau sistem partai

manapun; ini sebuah pemahaman menyeluruh tentang kemanusiaan.”

(J. Krishnamurti, *Freedom from the Known*, pp.51-52)

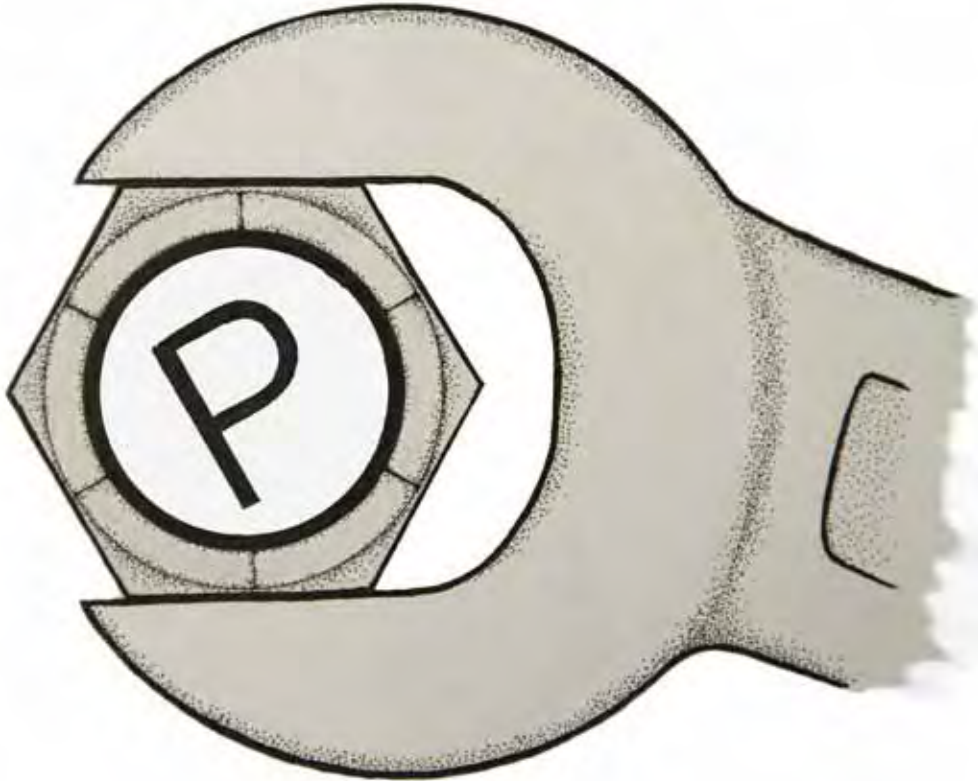
Kalau berdasarkan pada kutipan di atas, disadari atau tidak, ternyata banyak di antara kita juga pernah—atau sedang—melakukan kekerasan. Kita seolah membuat batas berdasarkan identitas individu, entah itu berdasarkan fakultas, jurusan, UKM, golongan, suku, agama, atau preferensi seksual. Misalnya “kamu mahasiswa Kristen; saya mahasiswa Manado” atau “dia lesbi; mereka waria” dan banyak perbedaan-perbedaan lain yang kerap mengusik telinga.

Saya tidak lantas menyalahkan konsep-konsep tersebut. Konsep memang perlu untuk mewakili sebuah objek. Contoh sederhananya begini, indra untuk melihat, kita menyebutnya mata. Mata inilah yang saya maksud dengan konsep. Begitu juga dengan konsep Sunda, Cina, Hindu, homoseks, mayoritas, minoritas, dan lainnya. Jadi, menurut saya fungsi konsep sekadar memudahkan penyebutan saja.

Namun, yang terjadi sekarang, barangkali kita telah keliru menempatkan fungsi dari berbagai konsep yang ada. Kita cenderung membuat semacam stereotip yang menempel pada konsep tersebut. Misal, Fakultas A mahasiswanya *doyan* berkelahi, mahasiswa jurusan Z sangat hedonis, Muslim itu identik dengan terorisme, seorang lesbian adalah pendosa. Hal-hal semacam itu sebenarnya hanya pandangan subjektif yang bersifat generalisasi. Kekeliruan kita adalah menempatkannya sebagai sebuah objektivitas. Inilah yang kemudian melahirkan kekerasan. Kekerasan yang mengikis nilai kemanusiaan. Kekerasan yang memunculkan konflik. Konflik yang sebenarnya tidak begitu penting dan pada akhirnya hanya merugikan banyak orang.

Kita tidak akan pernah bisa membuat dunia menjadi seragam, sesuai dengan keinginan kita. Perbedaan sudah ada bersama dunia sejak pertama kali ada. Hanya satu yang bisa kita lakukan, menerima perbedaan itu dalam bingkai persatuan.

Irene Tantri
Jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Ilustrasi : Revta / Bul

Kala Keamanan Jadi Alasan

Lahan parkir yang aman merupakan fasilitas wajib disediakan di tiap fakultas di UGM. Namun, beberapa pihak justru merasa prosedur keamanan tersebut mengganggu kenyamanan penggunaannya.

Lahan parkir yang ada di tiap fakultas disediakan sebagai tempat penitipan kendaraan milik mahasiswa, dosen, karyawan, dan para tamu. Berbagai peraturan ditetapkan demi keamanan kendaraan tersebut. Akan ada sanksi tersendiri bagi mereka yang memarkir kendaraannya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berbuah problema

Masing-masing fakultas memiliki peraturan penggunaan lahan parkir yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan penentuan kebijakan sepenuhnya diberikan kepada petugas Satuan Keamanan dan Ketertiban Kampus (SKKK) UGM di tiap *cluster*. Mereka kemudian bekerja sama dengan petugas parkir di tiap fakultas untuk berbagi tugas mengenai peraturan yang akan ditetapkan demi keamanan parkir. "Yang membangun dan *melihara* itu DPPA (Direktorat Pemeliharaan dan Pengelolaan Aset, -Red), tapi teknis pelaksanaan ada di SKKK," terang Sulistyio, Kepala Sie Ketertiban Lingkungan DPPA UGM.

Aturan dan sanksi mengenai penggunaan lahan parkir sendiri tidak pernah tertuang secara resmi dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Rektor. "Implisitnya itu adalah *gimana* bahwa kendaraan bermotor yang tidak ber-KIK (Kartu Identitas Kendaraan, -Red) itu *nggak* boleh parkir di UGM, tapi eksplisit parkir itu tidak ada," ujar Drs Msc Noorhadi Rahardjo, Kepala SKKK. Aturan mengenai lahan parkir di dalam Surat Keputusan (SK) Rektor hanya sebatas pada penggunaan KIK, bukan tentang bagaimana para petugas harus menyikapi pelanggaran yang terjadi di lahan parkir. Format tak tertulis ini sengaja

diterapkan untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. “Kalau *nggak* ditulis, *kan* ketahuan kalau orang sini atau bukan. Kalau bukan, *kok* parkir sini. Itu memang *nggak* dibuat tertulis, soalnya *kalo* dibuat tertulis maling akan tahu,” jelas Imam, petugas parkir Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Bulaksumur.

Karena kebijakan diserahkan langsung kepada petugas di lapangan, ada beberapa peraturan yang ditetapkan oleh petugas parkir tanpa sosialisasi terlebih dahulu, khususnya mengenai sanksi yang diberikan. Hal ini menyebabkan beberapa pihak khususnya mahasiswa merasa dirugikan. Di beberapa lahan parkir, seperti di Sekip, tindakan petugas parkir dinilai berlebihan dalam memberikan sanksi. Sebagai contoh, ada petugas yang menggemboskan ban motor yang parkir melebihi jam malam. “Saya pernah *digembosin* bannya karena motor parkir sampai malam,” tutur Ardian (SV Teknik Mesin '10). Beberapa mahasiswa bahkan bercerita bahwa ban motornya pernah disayat karena masih parkir di malam hari. “Ban motor saya pernah disilet depan belakang *Iho*,” kisah Yuli (Komunikasi '09). Beberapa mahasiswa lainnya juga mengaku bahwa kendaraannya pernah dirantai atau dimasukkan ke dalam parit.

Pihak SKKK mengakui bahwa mereka melakukan penggembosan ban untuk menjaga keamanan kendaraan itu sendiri. Hal tersebut dilakukan agar jika ada orang yang berniat jahat ingin mencuri kendaraan, dia akan kesulitan dan berpikir ulang. Dari sekian banyak tindakan yang dilakukan petugas parkir, sebenarnya semua itu hanya didasari alasan keamanan. Meski begitu, terkadang hal tersebut justru dirasa merepotkan mahasiswa. Permasalahan seperti ini memang acap kali menjadi dilema tersendiri bagi petugas keamanan. Namun, khusus untuk kasus ban motor yang disayat, pihak SKKK membantahnya. “Itu bukan perbuatan SKKK, karena kita *nggak* berani sampai seperti itu, namanya udah merugikan mahasiswa yang kita jaga,” tegas Warsidi, petugas SKKK Fisipol Sekip.

Sanksi yang mendidik

Meski begitu, tak semua penjaga menggunakan cara ekstrem seperti penggembosan ban untuk menjaga keamanan kendaraan di tempat parkir. “Kalau *nggembosin* saya *nggak* tega. Paling kita tungguin. Kalau *nggak* mau *nurutin* aturan sini, jangan parkir sini,” ungkap Warsono, petugas SKKK yang berjaga di parkir portal selatan Perpustakaan Pusat.

Di Fakultas Kedokteran, sepeda yang tidak dikunci akan dibawa ke portal KIK FK paling utara. Jika lewat dari jam sepuluh malam, motor yang masih ada di lingkungan kampus akan digembok. “Kita amankan, kita bawa ke sini,” jelas Slamet Waljemadakhir, petugas keamanan Fakultas Kedokteran UGM.

Begitu pula yang dilakukan oleh penjaga lahan parkir Lembah. Jam operasional parkir Lembah memang hanya sampai pukul sembilan malam. Jika masih ada motor yang parkir di sana lewat dari jam malam, atau jika kondisi sekitar Lembah sudah sepi, maka motor tersebut akan diangkat menggunakan mobil patroli SKKK. Motor ini kemudian dipindahkan ke pos SKKK di dekat Masjid Kampus atau di gedung pusat. Petugas akan memasang pemberitahuan tentang lokasi pemindahan motor. “Kita *tulisin* *kok* di posnya itu *kalo* mau *ambil* motor silakan ke ini ini ini,” tambah Warsono.

Idealnya, sanksi yang diterapkan bersifat mendidik dan tidak merugikan seperti peringatan agar tidak mengulangnya lagi. Di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik misalnya, helm akan diambil ketika stang motor dikunci. Hal ini dimaksudkan agar pengendara tahu kesalahannya dan tidak

mengulangnya lagi. “Kalo helmnya *nggak* diambil *kan* kita *nggak* tahu,” ungkap Imam. Selain itu, para mahasiswa yang melanggar juga diwajibkan membuat surat pernyataan berjanji tidak akan mengulangi.

Selain motor, pengguna mobil pun masih ada yang melakukan pelanggaran, misalnya memarkir mobil di jalur sepeda padahal sudah disediakan kantong parkir. Sebagaimana pengguna motor, tidak ada sanksi khusus yang dikenakan. Mobil tersebut hanya akan ditemplei kertas bertuliskan keterangan salah parkir. Harapannya, dengan surat peringatan seperti itu, pelanggaran tersebut tidak akan berulang lagi. Berbeda dengan motor, tidak ada petugas yang mengambil tindakan menggembosi ban mobil. “Ya *mosok digembosi* *kan* ya kasihan. *Kalo* bisa ketemu ya dikasih tahu,” tambah Sulistyو.

//

Kalau *nggak* mau *nurutin* aturan sini, jangan parkir sini.

//

-Warsono, petugas SKKK-

Di sisi lain, umumnya pelaku pelanggaran lahan parkir adalah mahasiswa, baik yang menggunakan sepeda, motor, atau mobil. Padahal seharusnya mahasiswa, sebagai pengguna lahan parkir terbesar, sadar akan peraturan yang berlaku. “Perilaku mahasiswa sendiri tidak mencerminkan orang berpendidikan. Contohnya, sudah parkir di situ, langsung ditinggal lari. *Lha* itu *gimana?*” papar Sulistyو. Pada akhirnya, hal inilah yang menimbulkan beberapa masalah berkaitan dengan penggunaan lahan parkir kampus.

Beragam kasus yang muncul ini sebenarnya memiliki satu solusi, yaitu kembali pada kesadaran diri masing-masing pengguna parkir untuk menaati peraturan yang telah ditetapkan. Mengenai permasalahan parkir ini, Warsidi berpesan pada semua pengguna tempat parkir, “Ya, taatilah peraturan. Apa yang kita bisa lakukan demi keamanan ya kita lakukan. Kalau motornya dicuri yang rugi *kan* yang punya.”

Irma, Reza, Wanda



Ilustrasi : Sicyl / Bul

Simbiosis Mutualisme PKL dan Kantong Parkir

UGM mencoba memenuhi janji meramaikan area relokasi PKL dengan membangun kantong parkir di sekitarnya. Di sisi lain, pihak SKKK juga merasa terbantu oleh keberadaan PKL dalam mengamankan lahan parkir.

Salah satu upaya UGM dalam rangka penertiban dan penataan kawasan kampus adalah penataan pedagang kaki lima (PKL). Pada tahun 2009, UGM menertibkan pedagang kaki lima yang berada di sekitar Jalan Olahraga (*boulevard*) dan merelokasi mereka ke barat Gelanggang. Area tersebut sekarang menjadi Foodcourt Plaza Kampus. Selanjutnya pada awal tahun 2011, UGM merelokasi PKL di sepanjang Lembah UGM ke timur Fakultas Filsafat yang sekarang disebut Pusat Jajan Lembah (Pujale).

Saat awal direlokasi, banyak pedagang yang mengeluh karena tempat mereka sekarang sepi pembeli. Di sisi lain, sejak akhir 2010 UGM mulai menyediakan kantong-kantong parkir di sekitar kampus. Hal ini ditujukan bagi mahasiswa baru angkatan 2011 dan seterusnya yang tidak diperbolehkan membawa kendaraan bermotor ke dalam kampus. Demi merangkul dua kepentingan ini sekaligus, UGM membangun beberapa kantong parkir di sekitar area relokasi PKL.

Saling mendukung

Keberadaan kantong parkir dinilai berdampak positif bagi pedagang-pedagang di seputaran kampus. PKL mendapatkan fasilitas yang memadai dan tempat yang lebih nyaman. Untuk fasilitas tersebut, para PKL yang tergabung dalam Pujale ini memberikan retribusi untuk kebersihan dan keamanan. "Jadi kita *ngasih* retribusi untuk pembiayaan kalau ada yang rusak. Untuk sementara ini untuk aktivitas kebersihan, bayar listrik, bayar air, keamanan," tutur Yoga Adi

Pratama selaku Ketua Pujale. Sulisty, Kepala Seksi Keamanan Lingkungan DPPA UGM juga mengungkapkan bahwa para pedagang itu diakomodasi dengan fasilitas berupa kantong parkir yang nyaman dan bersih, serta didukung dengan adanya kios-kios. UGM tidak mengeluarkan dana sepeser pun untuk membangun pusat jajan tersebut karena disponsori oleh Koperasi Keluarga Gadjah Mada (Kokelgam). Ini serupa dengan Kantin Humaniora yang secara operasional didanai oleh Bank Mandiri.

Selain akomodasi tempat, standardisasi kesehatan juga mendapat perhatian. "Tentu saja kesehatan mahasiswa adalah prioritas kami. Para pedagang itu kami latih dulu mengenai standar penyajian dan pengolahan masakan di Pusat Studi Pangan dan Gizi UGM," jelas Sulisty. Adi juga menjelaskan bahwa UGM telah memberikan pelatihan dan pembinaan bagi para pedagang, "Sekarang ada pembinaan, kalau dulu tidak ada pembinaan sama sekali. Kemarin setelah kami masuk juga ada pelatihan dari UGM," ujar Adi.

Sulisty mengungkapkan bahwa secara tidak langsung telah terjadi simbiosis mutualisme antara keberadaan kantong parkir dan *foodcourt* Lembah UGM. Di satu sisi, pedagang jadi merasa lebih tenang karena keberadaannya telah diakui. Di sisi lain, Satuan Keamanan dan Ketertiban Kampus (SKKK) juga sangat terbantu dengan kehadiran para pedagang yang turut andil mengamankan lahan parkir. Banyak mahasiswa menanggapi positif keberadaan Pujale ini "Pusat jajanan itu oke *kok*, bikin *gak* macet," kata Dimas (D3 Akuntansi '11). Hal senada juga diakui Audi yang menyebutkan pusat jajanan itu bagus karena terpusat dan tidak makan badan jalan.

Optimalisasi sarana

Meski para pedagang mengerti bahwa adanya kantong parkir ini demi kelancaran dan ketertiban bersama, tetapi mereka juga merasakan adanya penurunan omzet. Konsumen PKL sekarang ini adalah mahasiswa UGM, yang cepat bosan dan jenuh, sehingga mereka tidak berlangganan tetap. Beberapa mahasiswa pun enggan jajan di Pujale karena lokasi yang terlalu jauh. "Aku sebenarnya *gak* begitu *tau*, soalnya aku *gak* pernah ke situ, soalnya jauh," ungkap Thata (Akuntansi '11).

Demi menyiasati penurunan omzet tersebut, pedagang berharap agar UGM memindahkan lokasi parkir terutama parkir mobil di area lembah bawah karena kantong parkir di atas sudah cukup penuh untuk menampung mobil-mobil mahasiswa. Parkiran yang terlihat penuh ini akan mengurangi minat konsumen di luar mahasiswa UGM untuk jajan di Pujale. "Sebenarnya di sini itu bagus, *pengen* saya biar yang di sini itu ya sebagian mobil orang umum bisa masuk untuk jajan, motor juga *nggak* apa-apa. Kalau anak *dalem* yang jajan *kan* ada bosennya, kalau orang lewat masuk pasti *dapet* uang tambahan," terang Saijo, salah seorang pedagang.

Berkaitan dengan keamanan, Hartono merasa sudah lumayan bagus karena sudah banyak tenaga dari SKKK yang mengamankannya. Pada pagi hari, ada empat personel di bagian selatan dan empat personel bagian utara. "Keamanan *Alhamdulillah* aman lancar," aku Adi. Selain itu, Dea (Sosek '12) menambahkan bahwa parkir di kantong parkir *cluster* Lembah juga nyaman, tempatnya rindang, luas, dan gratis, susahny kalau menyeberang saja. Meski demikian, sebagian mahasiswa masih enggan menempati kantong parkir karena kurang percaya dengan keamanan kendaraan mereka dan kerepotan yang harus dihadapi. Masih banyak dijumpai mahasiswa yang tidak memiliki Kartu Identitas Kendaraan (KIK) tetapi memarkir kendaraan di fakultas masing-masing. "*Mending* parkir di fakultas *aja*, *kan* lebih efisien dan aman. Belum *ntar* kalau hujan *kan* repot jalan dari lembah ke kampusnya," tutur Monika (Ilmu Ekonomi '11).

Hartono, koordinator *cluster* Lembah mengakui

bahwa banyak yang mengeluh karena kantong parkir ini jauh dan panas. Namun, ini sudah keputusan dari universitas.

"Kantong parkir cukup baik tujuannya, tetapi masih banyak yang mengeluh karena parkir jadi jauh," terang Dimas (D3 Akuntansi '11). Sementara itu, Rosi (Ilmu Hukum '12) mengakui bahwa adanya kantong parkir membuat kampus terlihat rapi dan kampus tidak terlalu penuh. Hingga saat ini, kantong parkir *cluster* Lembah bagian selatan mampu menampung 1500 kendaraan, sedangkan *cluster* Lembah bagian utara mampu menampung 2000 kendaraan. Tentunya seiring berjalannya waktu, dengan semakin bertambahnya mahasiswa tak dipungkiri kantong parkir tidak mampu lagi menampung banyaknya kendaraan mahasiswa yang tidak memiliki KIK.

//

Sekarang ada pembinaan,
kalau dulu tidak ada pembinaan
sama sekali. Kemarin setelah kami
masuk juga ada pelatihan dari UGM.

//

- Yoga Adi Pratama, Ketua Pujale -

Terkait dengan permintaan untuk menambah kantong parkir, Sulisty berpendapat bahwa masih ada kemungkinan menuju ke arah sana. "Ke depan tentu masih ada wacana untuk itu, UGM akan terus mencari sponsor sehingga program dapat berlangsung," imbuh Sulisty. Rencana tersebut diamini oleh Hartono. "Wacana *denger-denger* ada rencana menambah di utara lembah," ungkapnya. Memang pada 24 September 2012 lalu UGM telah mengeluarkan surat pemberitahuan rencana pembangunan tempat parkir kendaraan bermotor untuk wilayah Jalan Agro.

Hingga saat ini terdapat 22 PKL yang tergabung dalam Paguyuban Pujale ini. Selain menambah kantong-kantong parkir, diharapkan UGM segera melengkapi fasilitas bagi PKL seperti meja, kursi, dan keseragaman gerobak. "Solusinya ya kita segera dibenahi untuk pembangunannya. Nantinya akan segera dilengkapi fasilitas meja, kursi, dan penyeragaman gerobak," harap Adi. Dari segi penataan kampus, Sulisty menghimbau kepada mahasiswa untuk memanfaatkan kantong parkir sebaik mungkin. "Manfaatkan fasilitas ini sebaik mungkin sehingga polusi dapat ditekan. Kampus akan senantiasa mengkomodasi bila diperlukan," pungkas Sulisty.

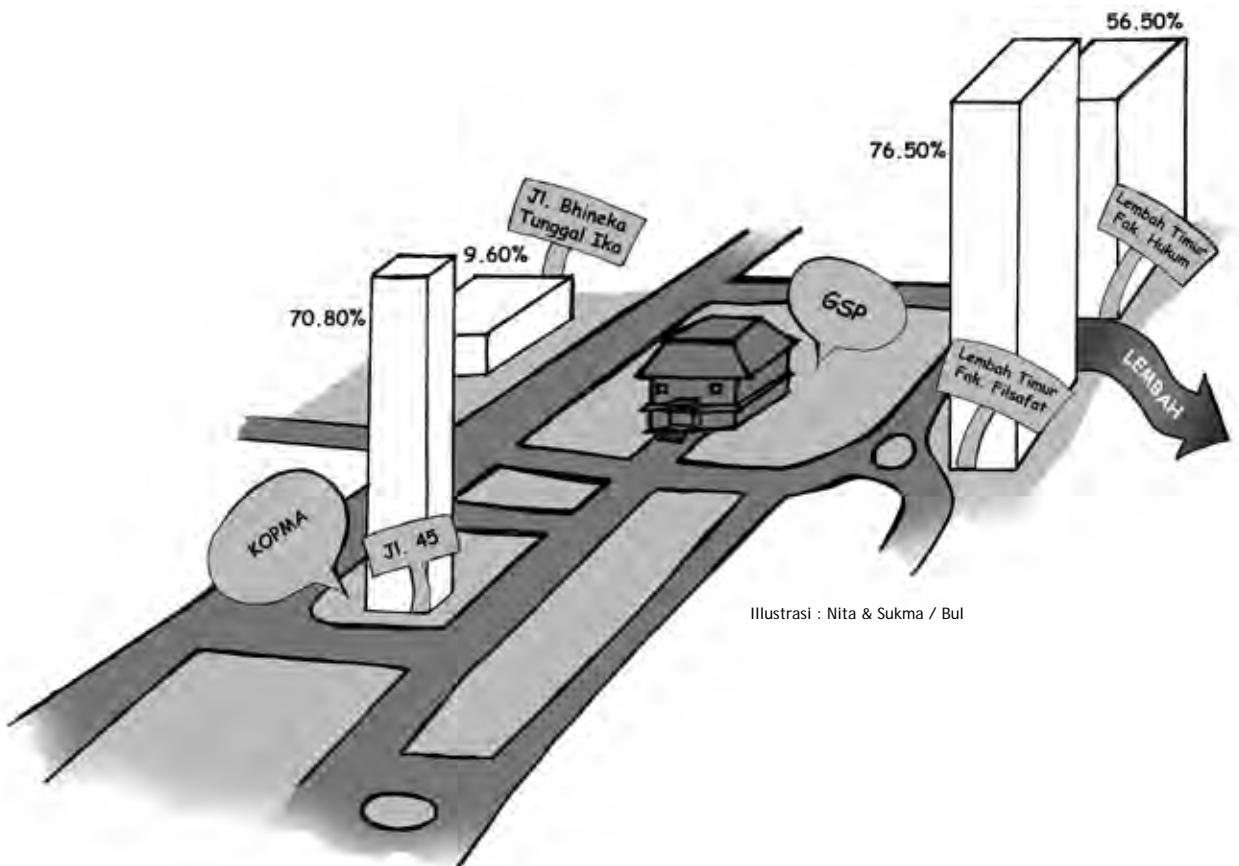
Amanda, Bimo

Ralat:

Di edisi 204 tertulis 'Benny, Ketua Gamabunta, seharusnya 'Benny, Ketua Komunitas Stand Up UGM'. Mohon maaf dan terima kasih.

Pemanfaatan Kantong Parkir UGM

Sebagai kompensasi dari upaya mengurangi lalu-lalang kendaraan bermotor, UGM menyediakan beberapa kantong parkir di luar kawasan kampus. Sayangnya, pemanfaatan kantong parkir ini belum optimal dan merata.



Dalam rangka mewujudkan visi sebagai kampus *educopolis*, UGM mengeluarkan serangkaian kebijakan terkait lingkungan kampus. Tahun 2010 silam, UGM mengeluarkan regulasi mengenai pemberlakuan Kartu Identitas Kendaraan (KIK) di kawasan kampus UGM. Pemberlakuan KIK tersebut diciptakan untuk mengurangi jumlah kendaraan yang berada di kawasan kampus. Upaya tersebut kemudian dilanjutkan dengan kebijakan baru pada tahun 2011, yaitu regulasi mengenai larangan membawa kendaraan bermotor bagi mahasiswa baru angkatan 2011 ke bawah. Secara eksplisit, UGM tidak memperkenankan adanya kendaraan yang berlalu lalang di dalam kawasan kampus selain kendaraan yang telah memiliki KIK. Oleh karena itu, bagi mahasiswa angkatan 2011 ke atas yang membawa kendaraan, disediakan tempat parkir khusus yang berada di luar kawasan kampus.

Pihak UGM telah menyediakan beberapa titik kantong parkir yang pada awalnya diharapkan mampu menampung sebagian besar kendaraan yang dibawa oleh para mahasiswa. Tahun pertama pemberlakuan kebijakan tersebut belum menunjukkan keberhasilan yang signifikan untuk menciptakan suasana kampus yang asri karena masih berlakunya izin untuk membawa kendaraan bagi para mahasiswa angkatan 2010 ke

atas. Berlanjut ke tahun ajaran berikutnya setelah penetapan pelarangan pembawaan kendaraan oleh mahasiswa pada tahun 2011, UGM kembali melanjutkan penerapan kebijakan tersebut pada mahasiswa angkatan baru 2012. Upaya tersebut diharapkan akan semakin mengurangi jumlah kendaraan yang lalu-lalang di kawasan kampus.

Namun, pada tahun kedua pemberlakuan peraturan tersebut muncul problema baru. Mahasiswa yang tidak diperkenankan untuk membawa kendaraannya masuk kawasan UGM tidak memiliki pilihan lain selain memarkir kendaraan mereka di kawasan kantong parkir khusus yang telah disediakan di luar kawasan kampus. Akibatnya, pihak yang mengurus kawasan kantong parkir tersebut mulai kewalahan karena jumlah kendaraan yang parkir meningkat drastis sedangkan area parkir tidak mengalami perluasan.

Menanggapi permasalahan kantong parkir tersebut, divisi Litbang Bulaksumur telah melakukan survei dan mencari data mengenai pemanfaatan kawasan kantong parkir oleh mahasiswa UGM. Berdasarkan survei dan data yang kami peroleh, ternyata pemanfaatan kantong parkir tidak merata. Data yang kami peroleh dari Direktorat Administrasi dan Akademik menunjukkan bahwa kawasan Lembah UGM

merupakan kantong parkir favorit. Kantong parkir Lembah yang terletak di sebelah timur Fakultas Filsafat digunakan oleh 842 kendaraan bermotor dari 1100 kuota yang disediakan (76.50%). Sejalan dengan itu, kantong parkir Lembah yang terletak di sebelah timur Fakultas Hukum digunakan oleh 791 kendaraan bermotor dari 1400 kuota yang disediakan (56.50%). Persentase yang berbeda terlihat dari penggunaan kantong parkir di Jalan Empat Lima dan Jalan Bhinneka Tunggal Ika. Kantong parkir Jalan Empat Lima digunakan oleh 319 kendaraan bermotor dari 450 kuota yang disediakan (70.80%). Sementara itu, kantong parkir di Jalan Bhinneka Tunggal Ika hanya digunakan oleh 231 kendaraan bermotor dari 2400 kuota yang disediakan (9.60%). Rata-rata penggunaan kantong parkir sebesar 40.80% atau 2183 kendaraan bermotor dari 5350 kuota yang telah disediakan.

Berpijak dari data-data di atas, Tim Survey Litbang SKM UGM Bulaksumur melakukan survei kepada 300 mahasiswa aktif UGM tentang apakah mereka menggunakan kantong parkir. Ternyata sebanyak 106 mahasiswa atau 35.30% mahasiswa menggunakan kantong parkir. Sedangkan 193 mahasiswa atau 64.30% mahasiswa tidak menggunakan kantong parkir dengan satu *sampling error*. Data-data tersebut memperlihatkan ketidakmerataan maupun penggunaan kantong parkir yang rendah. Hal itu dapat dilihat sebagai salah satu indikator bahwa kebijakan UGM tentang *educopolis* ternyata belum sukses.

Perlu sosialisasi

Banyak faktor yang mempengaruhi belum suksesnya penerapan kebijakan terkait kantong parkir ini. Jarak antara lokasi kantong parkir dan fakultas yang cukup jauh merupakan salah satu faktornya. Tidak sedikit mahasiswa yang datang ke kampus dengan membawa banyak buku tebal dan berat. Belum lagi saat hari sangat terik atau justru hujan. Bisa jadi mahasiswa lebih rela membayar karcis (karena memasuki wilayah UGM tanpa KIK) dibanding memarkir kendaraan mereka di kantong parkir yang jauh dari fakultas tersebut.

Surat Keputusan yang sudah dilayangkan DAA tentu bukan langkah akhir perwujudan kampus bebas kendaraan bermotor. Banyak hal yang masih harus dilakukan. Sosialisasi kepada warga UGM terutama. Terbukti baru 40,80% dari seluruh mahasiswa yang menggunakan kantong parkir. Hasil itupun tidak merata. Kantong parkir yang berlokasi di Lembah sebelah Fakultas Filsafat dan kantong parkir di Jalan Empat Lima (daerah Gelanggang, Swaragama, dan Food Court) menunjukkan hasil yang cukup baik, tetapi tidak pada kantong parkir di Jalan Bhinneka Tunggal Ika (dekat Pusat Pelatihan Bahasa).

Aturan penggunaan kantong parkir ini masih terkesan eksklusif dan tidak transparan, dirasa masih belum memiliki kekuatan untuk memaksa mahasiswa menggunakan kantong parkir. Mungkin karena kurang adanya sosialisasi dari pembuat

kebijakan kepada objeknya. Para pembuat kebijakan masih perlu *gembor-gembor* lagi agar seluruh mahasiswa mengetahui kebijakan ini dan turut menyuksekkannya.

Tentu kita tidak lantas hanya menghakimi para pembuat kebijakan yang terkesan setengah-setengah dalam merealisasikan kebijakan kantong parkir ini. Faktor respek dari objek kebijakan juga perlu dipertanyakan. Rasa hormat dan mau menghargai peraturan yang sudah ditetapkan juga mempengaruhi kesuksesan kebijakan ini. Mungkin ada sebagian mahasiswa UGM yang sudah mengetahui tentang kebijakan kantong parkir, tetapi dengan sejuta alasan merasa tidak perlu menaatinya. Namun, kembali lagi, respek dari mahasiswa baru bisa diperoleh apabila ada sosialisasi dan transparansi dari para pembuat kebijakan, misalnya dengan memberikan deskripsi dan argumentasi dari tujuan dibuatnya kebijakan kantong parkir ini.

Para pembuat kebijakan kantong parkir juga harus memberi insentif bagi mahasiswa. Mahasiswa harus dijanjikan bahwa kantong parkir dirancang dengan standar keamanan yang tinggi. Kantong parkir harus menjadi tempat yang layak untuk kendaraan berjam-jam berada di sana. Mungkin dengan memberi atap sehingga meski berlama-lama di kantong parkir, kendaraan tetap terjaga keawetannya mesinnya. Dari sisi keamanan juga harus disediakan petugas yang sigap dan kompeten di bidangnya.

Pada akhirnya, aturan tetaplah aturan. Aturan ditetapkan tidak tanpa proses. Sudah banyak penilai, penimbang, dan pemerhati yang bertanggung jawab sebagai penyaring sebelum suatu kebijakan ditetapkan.

Mahasiswa juga harus ikut berpartisipasi dalam mewujudkan kampus UGM yang aman, nyaman, dan ramah lingkungan. Suatu kebijakan akan berjalan dengan baik apabila ada kerja sama dan dukungan dari segala pihak yang terkait.

Sumber Data

Data Primer:

Metode pengambilan data : Survei, *Random sampling*

Jumlah responden : 299 mahasiswa aktif UGM

Sampling error : 0,5% (1 mahasiswa)

Tim survei : Litbang SKM UGM Bulaksumur

Data Sekunder :

Data dari Direktorat Administrasi dan Akademik UGM terkait Kebijakan Kantong Parkir per 13 September 2012

Dyan, Lisna



Yogyakarta Selalu Istimewa



Foto : Uthe/Bul

Keraton Yogyakarta merupakan simbol kekuasaan istimewa DIY.

Status keistimewaan Yogyakarta yang sekian lama 'digantung' akhirnya menemukan kejelasan setelah disahkannya UU Keistimewaan DIY akhir Agustus lalu.

Setelah 11 tahun terombang-ambing dalam pembahasan di DPR, jalan panjang perjuangan status keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akhirnya berakhir melegakan. Menjelang hari ulang tahun Kota Yogyakarta yang ke-256, pengesahan UU nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY ini seakan menjadi kado membahagiakan bagi seluruh warga. Banyak pihak yang menyambut baik keputusan ini setelah sebelumnya sempat menjadi kontroversi di berbagai kalangan.

Peran penting

Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan satu-satunya sistem monarki yang masih bertahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) saat ini. Status keistimewaan yang dimilikinya saat ini bukan tanpa alasan. Sebelum didirikan NKRI, satuan pemerintahan independen yang dikenal dengan sebutan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat telah berdiri. "Ini merupakan warisan budaya yang sudah tua. Bahkan sebelum NKRI ada, kesultanan sudah ada," ungkap Dra Kuskasriati selaku Kepala Bagian Humas Pemerintah Daerah DIY. Kewenangan kesultanan tersebut sudah diatur dalam perjanjian politik tahun 1940 dengan Belanda. Setelah berdirinya NKRI, Kesultanan Yogyakarta tidak dihapus melainkan berubah menjadi daerah istimewa setingkat provinsi.

Alasan lain mengapa daerah ini diberikan status

istimewa adalah peran besarnya dalam mempertahankan kemerdekaan, seperti saat ibukota RI harus berpindah sementara ke Yogyakarta. "Sultan Hamengkubuwono IX banyak membantu memperjuangkan kemerdekaan, sehingga sebagai balasannya Soekarno memberikan keistimewaan ini dan tidak mengubahnya menjadi seperti daerah daerah lainnya," tegas Kuskasriati. Dengan status sebagai daerah istimewa, gubernur DIY juga tidak dipilih melalui pemilihan kepala daerah seperti di provinsi lainnya, melainkan langsung melalui penetapan Sultan Hamengkubuwono sebagai gubernurnya.

Dianggap tidak demokratis

Selama 11 tahun terakhir, terdapat kontroversi mengenai status keistimewaan Yogyakarta ini. "Sebelumnya status keistimewaan Yogyakarta tidak pernah dipermasalahkan hingga tahun 2001," ungkap Kuskasriati. Polemik mencuat setelah pada tahun 2001 muncul gagasan dari pemerintah pusat bahwa seorang gubernur harus merupakan pilihan rakyat dan bukan mendapat jabatan karena keturunan. Pemerintah pusat pun sempat mengusulkan wacana mengenai 'gubernur utama' dan 'gubernur yang dipilih'. Istilah 'gubernur utama' merujuk pada Sultan Hamengkubuwono sedangkan 'gubernur yang dipilih' merujuk pada sosok gubernur hasil pemilihan umum.

Polemik tentang keistimewaan ini berawal dari anggapan bahwa Yogyakarta tidak menganut sistem demokrasi yang dianut Indonesia dengan status DIY. Namun hal tersebut dibantah tegas oleh Rr. Arum Puspitarini (Perikanan '11) yang masih memiliki keturunan keraton. Menurut Arum, Yogyakarta mempunyai sistem demokrasi sendiri. "Mereka berpikir bahwa yang berhak memimpin mereka adalah rajanya sendiri yaitu Sultan Hamengkubuwono dan wakilnya Pakualaman. Demokratisnya itu ada di pengangkatan raja, itu merupakan kesepakatan seluruh warganya," jelasnya.

Menurut Kuskasriati, tindakan pemerintah pusat tersebut tentunya mengandung agenda politik. Ia menjelaskan bahwa 80% wilayah tanah di DIY adalah milik Sultan dan rakyat dikenakan pajak yang sangat rendah bahkan pajak bagi para petani. "Dengan hilangnya kesultanan di DIY, maka tanah-tanah itu akan menjadi milik negara dan negara akan memungut pajak yang tinggi sehingga malah memberatkan rakyat DIY," tambahnya. Status keistimewaan DIY diombang-ambingkan sejak tahun 2001 dan selama 11 tahun, Sultan Hamengkubuwono X tidak lagi dilantik sebagai gubernur DIY. "Status sultan sebagai gubernur diperpanjang terus-menerus tapi tidak dilantik, jadinya *kan* status Sultan juga tidak jelas," papar Kuskasriati.

Dukungan warga

Wacana untuk mengubah status keistimewaan DIY dan gagasan tentang pemilihan gubernur tersebut menuai reaksi dari banyak pihak. Di berbagai sudut Yogyakarta bertebaran spanduk yang berisi dukungan terhadap status keistimewaan DIY dan pernyataan pro penetapan. Rakyat Yogyakarta asli terutama masih meyakini legitimasi sultan sebagai penguasa. Wagimin (47), salah seorang tukang becak yang biasa *mangkal* di Malioboro menjelaskan bahwa ia sudah terlanjur nyaman dengan sosok Sultan HB dan kebijakannya selama ini. "*Rasane ora ono sing iso ngganteni* (rasanya tidak ada yang bisa menggantikan, -Red) Pak Sultan, dari laut sampai gunung *manut* sama beliau," seringainya.

Fenomena tersebut diakui oleh sosiolog UGM, Oki Rahadianto MSI. "Masyarakat Yogya sudah sangat familiar dan nyaman dengan sosok Sultan. Masih ada latar belakang metafisik yang meyakini bahwa Sultan mempunyai kuasa atas

Merapi, pantai, dan daerah lain yang dianggap keramat secara turun-temurun," ungkap Oki. Lebih lanjut ia menambahkan, permasalahan keistimewaan yang telah lama bergulir ini telah menghimpun integrasi sesama warga. "Banyak warga Yogya yang memunculkan gerakan reaksioner, bukan hanya demo tapi lewat musik, mural, teater dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan rasa antusiasme dan solidnya warga Yogya," jelas Oki.

Kontroversi keistimewaan DIY pun akhirnya diselesaikan dengan disahkannya Undang Undang Keistimewaaan (UUK) No 13 tahun 2012. Status keistimewaan Yogyakarta dipertahankan, tetapi dengan syarat sultan tidak boleh terlibat dalam partai politik manapun. Namun pembatasan hak politik sultan tersebut disayangkan oleh beberapa kalangan. "Jadi RUUK DIY walaupun bagus tapi itu kesannya seperti membatasi Sultan untuk maju sebagai pesiden, padahal Sultan sendiri kan WNI. Jadi, seharusnya Sultan tetep boleh jadi presiden *dong*," ungkap Darnanto (Imu Komputer '11) mahasiswa UGM asal Ngawi Jawa Timur.

Setelah pengesahan UUK DIY dan pelantikan Sultan Hamengkubuwono X sebagai Gubernur DIY, sejumlah harapan pun bergulir untuk kemajuan Yogyakarta. "Harapannya Yogya lebih maju, Sultan bisa mengemban amanah rakyat dengan bijaksana. Kalau bisa juga Yogya dibikin jadi pusat budaya yang patut dicontoh sama daerah-daerah lain di Indonesia biar kebudayaan kita *nggak* diklaim sama negara lain," ungkap Darnanto. Senada dengan Darnanto, Arum menuturkan, "Ya semoga di bawah pimpinan Sultan Yogya jadi daerah yang makmur, rukun, damai, *nggak* ada kerusuhan, makin disegani sama daerah-daerah lain, dan makin banyak menarik minat wisata turis-turis asing supaya jadi aset negara juga." Kuskariati pun mengamini hal tersebut. Ia mengharapkan agar DIY bisa menjadi daerah wisata berbasis budaya terkemuka di Asia Tenggara dengan dilakukannya berbagai pembangunan di beberapa wilayah DIY. Ia juga mengharapkan dukungan dari segenap masyarakat. "Harapan saya agar rakyat tetap semangat mempertahankan status keistimewaan ini. *Wong* orang asing aja kagum *kok* sama kesultanan DIY masa negara sendiri malah mau menghapus," tegasnya.

Bagaimanapun juga, Yogyakarta memang selalu istimewa. Ragam budaya serta keramahan warganya selalu membuat kota ini berhati nyaman dan menyamankan hati. Selamat Ulang Tahun ke-256 untuk Kota Yogyakarta, semoga selalu tenteram dan berbudaya!

Arum, Mada, Lia



Tugu Yogyakarta, salah satu titik pemasangan baliho keputusan penetapan.

Aksi Dukung KPK



Puluhan massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) UGM melakukan aksi di Bunderan UGM pada Sabtu (6/10). Aksi tersebut bertujuan untuk merespon penyerangan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh polisi pada malam sebelumnya. Melalui aksi dan gerakan 1000 tanda tangan tersebut, massa menyatakan solidaritas dan keprihatinan mereka untuk KPK.

Foto dan Teks: Rini/ Bul

Website Informasi Seputar UGM

- www.ugm.ac.id
Situs resmi Universitas Gadjah Mada. Berisi segala macam informasi umum tentang UGM dan rilis berita dari Humas UGM.
- www.dirmawa.ugm.ac.id
Situs resmi Direktorat Kemahasiswaan UGM. Berisi informasi penawaran beasiswa dalam negeri.
- www.pkm.dirmawa.ugm.ac.id
Portal kegiatan kemahasiswaan UGM. Berisi panduan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), manajemen proposal pengajuan dana untuk kegiatan kemahasiswaan, serta informasi prosedur seleksi mahasiswa berprestasi (mapres).
- www.oia.ugm.ac.id
Situs Kantor Urusan Internasional (Office International Affairs) UGM. Berisi informasi penawaran beasiswa luar negeri dan acara-acara yang melibatkan pihak asing.
- www.ecc.ft.ugm.ac.id
Berisi informasi lowongan kerja, perusahaan, serta tips-tips yang berkaitan dengan karir.
- www.elisa.ugm.ac.id
Portal *e-learning* untuk *civitas* akademika UGM. Memfasilitasi interaksi antara dosen dengan mahasiswa, unggah dan unduh materi kuliah, dan lain sebagainya.
- www.akademika.ugm.ac.id
Portal akademik bagi *civitas* akademika UGM. Selain digunakan untuk mengisi Kartu Rencana Studi dan melihat Kartu Hasil Studi atau transkrip nilai, portal ini juga menyediakan fasilitas forum diskusi.
- www.lib.ugm.ac.id
Selain berisi informasi layanan dan katalog *online* Perpustakaan Pusat UGM, situs ini juga menyediakan *link* akses *e-book* dan jurnal *online* yang dimiliki dan dilanggan UGM.
- www.bulaksumurugm.com
Berisi liputan terkini seputar UGM dari sudut pandang mahasiswa. Cara mudah melihat kampus kita.

Salsabilla

//

Kami poeta dan poetri Indonesia, mengakoe
bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia.
Kami poeta dan poetri Indonesia, mengakoe berbangsa
jang satoe, bangsa Indonesia.
Kami poeta dan poetri Indonesia, mendjoendjoeng
bahasa persatoean, bahasa Indonesia.

//

Menjelang 84 tahun Sumpah Pemuda,
28 Oktober 1928 - 28 Oktober 2012



**YLICO**
INDONESIA
YOUTH LITERACY AND INFORMATION COUNCIL OF INDONESIA

Lomba Menggambar dan Mewarnai

Untuk PRIBU, TK dan SD
Se-DIY dan Jabeng

"DALAM TAKJUB SAKURA DI JOGJA"

PEKESAMPAN
- Minggu, 24 Oktober 2015
- Pukul 08.00 - 17.00 WIB
- Peserta: 18 - 19 th. Wd
- Fasilitas: Makanan, Minum, Listrik
- Lokasi: Komplek Kampung Baru (Jl. Siliwangi No. 10)

KATEGORI
- Ragam + Ragam + Uang Poinstasi

KATEGORI LOMBA
- Lomba Melukis untuk PRIBU dan TK
- Tema: Peninggalan & Yenggo
- Lomba Menggambar untuk SD
- Kelas 1-5
- Tema: Eks dan Media Pelukisan
- Kelas 6-9
- Tema: Peninggalan Indonesia dan Yogyakarta
- dan untuk Kemandirian berprestasi dengan
- untuk tema penerapan teknologi informasi yang baik dan benar

PENYANGKUTAN
- Kantor YLICO
- Jl. Pemuda No. 1, Yogyakarta
- Pendaftaran online tanggal 15 Oktober 2015
- KRI
- Jl. Pemuda No. 1, Yogyakarta
- Pendaftaran online tanggal 15 Oktober 2015

KONTRIBUTUSI
Rp. 50.000,-

FASILITAS
Pisang
Santitas
Suket
Lenteng
Kendaraan

WISATA
Museum Film
Museum
Kampung
di

ITILU **RCV** **W**

YOGYAKARTA PERSONAL HOME GALLERY
Yogyakarta - INDONESIA